

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

**NOR ISMAWATI
NPM : 13300063**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2020

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

NOR ISMAWATI
NPM : 13300063

SURABAYA, 12 NOVEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

(Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum)

(Ahmad Basuki, SH., M.H)

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

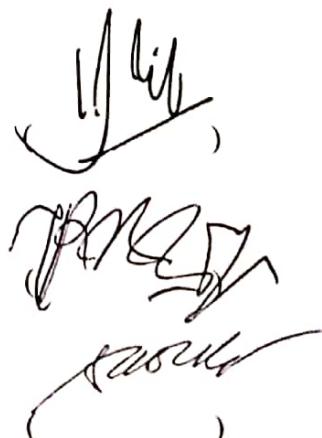
OLEH :

**NOR ISMAWATI
NPM : 13300063**

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum | Ketua |
| 2. dr. Ratna Winahyu L.D., SH M.Hum | Anggota |
| 3. Ahmad Basuki, SH., M.H | Anggota |



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan rahmatnya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Dalam hal ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ahmad Basuki, SH., M.H. sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Segenap Tim Pelaksana Skripsi dan Sekretariat Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi proses penyelesaian Skripsi.
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih terbatas, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan ini ke depan.

Surabaya, 12 November 2019



Nor Ismawati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nor Ismawati

Npm : 13300063

Alamat : Pradah Kali Kendal II No.16 Surabaya

No Telp : 081331074119

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buka tiruan plagiat dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 12 November 2019



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ini pertama bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi dan yang kedua Untuk mengkaji atau menganalisis prospek formulasi aturan pemidanaan (pertanggung jawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Tata cara pemeriksaan perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang terhadap tindak pidana korporasi tetap dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang pidana khusus, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan korporasi terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain : Aspek Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan yaitu Sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, Penegak hukum tidak sepenuhnya mampu membuktikan perbuatan dan kesalahan korporasi atas perbuatan pengurusnya; Aspek Pemeriksaan di Tingkat Penuntutan yaitu Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi, kemudian Perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama; Aspek Majelis Hakim Di Tingkat Pengadilan yaitu Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan/ staf sedangkan pelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya, tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali keterangannya yang telah diberikan sebelumnya dalam berita acara penyidikan

Kata Kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawab Pidana

ABSTRACT

Research has been called the application of corporate accountability in matters of corruption crimes for the first aims to assess or analyze formulations rules punishment (criminal accountability) corporation in corruption and the second to assess or analyze the prospect of the rules formulation punishment (criminal responsibility for the corporate) in a felony corruption in the future.

Research methodology used in thesis it uses research methodology juridical normative , namely research to rules legislation and literature pertaining to matter discussed .

Based on the research done it can be concluded the procedures for the spirit keeps the matter hidden examination campaign being conducted by the by corporations pt pgn promised to supply investigation , the prosecution of , and examination upfront due to go on trial against the criminal deeds as meant we stay working on the corporate based on the book of criminal law code (KUHAP) with a few wonderful exceptions which already been set in a variety of law special crimes , the constraints barriers faced by law enforcement officials in conducting the examination of the corporation against parties who are involved in spirit keeps the matter hidden of criminal acts of corruption its industrial activity among others The aspect of examination at the level of the investigation that is more difficult it was to uncover or entrap investors of criminal acts of corruption in giving evidence any who can convince the judge , law enforcement not fully capable of being proved their hands and their corporate mistake of what managers; aspect examination at the level of the prosecution evidence any shortage and that is the evidence that legal according to law in find out the corruption , then conducted by corporate corruption case revealed after after the start of a relatively long time; aspect the judge in at the level of the court which is generally an offender of criminal acts of corruption Is a superior / your leaders officials) so that an offender protected korp or agencies , in addition to the witness is subordinate to officials while an offender was a superior so that sometimes in the trial a witness whose testimony is actually did not want to give , it is a rare witnesses who filed in front of the trial take back information to who had been granted before the investigation

Keywords : Corporate, Corrupt, Accountability, Crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	7
C. Manfaat Penulisan	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	21
F. Pertanggungjawaban Sistematika	23
BAB II TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT PERMA 1 TAHUN 2016	25
A. Pemeriksaan Perkara Korupsi Berdasarkan Perma 1 Tahun 2016	25
B. Penetapan Sanksi pidana terhadap Korporasi	43
C. Pihak yang menanggung pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi	49

BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	55
A. Kendala yang Dihadapi dalam Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	55
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Pemeriksaan di Tingkat Penuntutan	58
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Majelis Hakim Di Tingkat Pengadilan	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66